Jurnal Diplomasi Pertahanan,
Volume 6, Nomor 3, 2020 E-ISSN 2746-8496

STUDI KEAMANAN NASIONAL DALAM PRESPEKTIF DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA

STUDY OF NATIONAL SECURITY IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN DEFENSE DIPLOMACY

Soegeng

Program Studi Diplomasi Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Jl. Salemba Raya No.14, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430
sugeng@idu.ac.id

Abstract

In this journal, the authors discuss the concept of national security studies and Indonesian Defense Diplomacy. Previous studies have not used much of the theory of Indonesian Defense Diplomacy and the concept of national security studies to analyze it. Furthermore, this study aims to clarify national security studies from the perspective of Indonesian Defense Diplomacy in producing defense policy. Through the content analysis approach method, the research results show the importance of strengthening regulation and strengthening public diplomacy and military diplomacy to strengthen defense diplomacy. As stated in the 2015 Indonesian Defense White Paper, capacity building and trust-building are intended to improve human resources for the Ministry of Defense and the TNI. The 2021 Draft State Budget aimed at accelerating the national economic recovery. Trust building aims to increase the trust of Indonesian Defense Diplomacy with regional countries, for example, Russia and South Korea, Turkey. They were enhancing national security through economic strength, military and diplomacy capabilities, and conducting broader cooperation in the future. The strong economic, military, and Defense Diplomacy of Indonesia are the basis for strengthening National Security. In the future, it can face AGHT in this era of globalization.

Keywords: Study concept, national security, Indonesian Defense Diplomacy

1. Pendahuluan

Kita ketahui bahwa Keamanan nasional menunjukkan kebijakan negara dalam meyakinkan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kekuasaan ekonomi dan kekuasaan militer dan kemampuan Diplomasi pertahanan dimasa damai atau dimasa perang. Prinsip penggunaannya adalah keamanan nasional di dunia dikembangkan oleh negara adikuasa Amerika Serikat pada tahun 1942 sampai dengan 1945 setelah Perang Dunia ke II. Sedangkan keamanan nasional Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kebijakan keamanan nasional yang diambil adalah menjalin hubungan Luar Negeri yang baik serta mengambil penyelesaian masalah – masalah konflik separatism diantaranya GAM, Bintang Kejora, RMS serta terorisme dalam negeri secara internal dengan sebaik baiknya dengan memberlakukan darurat sipil dan darurat militerdi Aceh hasilnya sangat efektif. TNI dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik- baiknya. Meskipun tekanan Amerika Serikat dan Sekutunya Inggris dengan mengembargo kita, sehingga Alut Sista Tank, Pesawat dan KRI buatan Amerika dan Inggris tidak boleh digunakan dalam Darurat Militer. Tetapi TNI dengan cepat menjawab permasalahan tersebut dengan memerintahkan Tank Amfibi buatan Rusia, Artileri Medan dan Rgrad 70/ Vampire dari Cekoslovakia dan Pesawat Sukhoi dari Rusia sanggup membantu memperkuat sistim persenjatan terpadu TNI dalam menumpas GAM di Aceh, Kebijakan keamanan nasional Indonesia tidak terpengaruh secara signifikan,

"Program Pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Karena itu, kebijakan relaksasi deficit melebihi 3 persen dari PDB masih diperlukan , dengan tetap menjaga kehati-hatian, kredibilitas dan kesinambungan fiscal, demikian yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan Pidato Keterangan Pemerintah atas RAPBN

2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI di gedung Nusantara, Senayan Jakarta 14-9-2020" (Widodo Jokowi:2020).

"Dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI tanggal 11-11-2020, ditegaskan olen Kemenhan RI bpk Prabowo bahwa Kekuatan militer Indoneia bukan hanya untuk menyerang negara lain, tapi lebih pada memperkuat pertahanan. Akan percuma pembangun infrastruktur yang semakin massif tak diiringi dengan pertahanan yang kuat. Wawasan pemikiran itulah yang akan di terapkan dalam sistim pertahanan bangsa Indonesia. (Prabowo;2020).

Menurut Presiden Joko Widodo, Diplomasi adalah bagaimana kita bisa menjalin perdagangan investasi dengan negara lain, saya melihat perkembangan di negara lain. Kita memiliki kemajuan yang sangat pesat, hal-hal yang berkaitan dengan tariff dan non tariff bisa dibicarakan jika Diplomat memiliki kemampuan negosiasi dengan negara lain yang baik. Kita juga memiliki diplomat yang pintar (Widodo Jokowi:2020).

Penyusunan Grand Strategy keamanan nasional Indonesia mampu menghadapi dinamika dalam dan luar negeri, serta keamanan bangsa dan negara" (Suci Utami:2018)

Wilkipedia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan Azas yang menjadi pedoman dan desain dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.

Dikatakan oleh Waltz "Kepentingan para penguasa , dan kemudian negara membuat suatu rangkaian tindakan, kebutuhan akan kebijakan muncul dari persaingan Negara yang diatur, kalkulasi yang didasarkan pada kebutuhan- kebutuhan ini dapat menemukan kebijakan- kebijakan yang akan menjalankan dengan baik kepentingan- kepentingan Negara, keberhasilan adalah ujian terakhir kebijakan itu, dan keberhasilan didefinisikan sebagai memelihara dan memperkua Negara- hambatan- hambatan struktur menjelaskan mengapa metode- metode tersebut digunakan berulang kali

disamping perbedaan- perbedaan dalam diri manusia dan Negara- Negara menggunakannya (Waltz:1979.hal117).

Definisi Diplomasi Pertahanan Indonesia adalah "Dalam melakukan suatu Diplomasi, komunikasi dan negosiasi yang merupakan komponen penting yang akan digunakan dalam mencapai suatu tujuan dari Diplomasi itu sendiri. Dengan adanya komunikasi yang baik yang terjalin tersebut, maka Diplomat akan dapat dengan mudah untuk mencapai kepentingan suatu negara, menggingat setiap Diplomasi yang dilakukan pasti membutuhkan adanya kecakapan dalam bergaul, adanya komunikasi antar pihak. Maka dari itu negosiasi dan komunikasi merupakan dua hal yang saling terkait (Putman dan Rolff:1992).

2. Metodologi

Metode penelitian dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan content analysist. Kontens Analisis merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi pola dalam melakukan analisis isi melalui pengumpulan data secara sistematis dari sekumpulan teks, yang dapat berupa tulisan, lisan, atau visual: Buku, surat kabar, dan majalah. Metode ini digunakan untuk menentukan keberadaan kata atau konsep tertentu di dalamnya teks atau kumpulan teks. Peneliti mengukur dan menganalisis keberadaan, makna, dan hubungan semacam itu kata-kata dan konsep, kemudian membuat kesimpulan tentang pesan di dalam teks.

Teks dalam satu penelitian juga dapat mewakili berbagai macam perbedaan. Analisis konten pada penelitian analisis teks artikel-artikel terkait degan studi keamanan nasinal dan diplomasi pertahanan. Analitik teks membantu seorang analis diplomasi pertahnan dalam tahap perencanaan dan kegiatan penelitian. Siklus pengambilan keputusan pertahanan melibatkan analisis lingkungan operasi

yang ekstensif, tepat waktu, dan terperinci. Ini membutuhkan banyak bacaan oleh analis untuk menganalisis konten sepenuhnya. Peringkasan awal tema topik dalam banyak teks, menghemat waktu yang dihabiskan untuk membaca materi dan memfokuskan upaya penelitian analis menyediakan metode untuk memprioritaskan dokumen berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. (Hall, 2016)

3. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka yang penulis gunakan adalah teori Realisme. "Realisme adalah suatu teori pertama tentang masalah keamanan negara-negara berdaulat dalam anarki internasional, dan kedua tentang masalah ketertiban internasional. Dasar normatife realisme adalah kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional. Jika politik dunia terus diselenggarakan atas dasar negara-negara merdeka dengan sekelompok kecil negara kuat yang sangat bertanggung jawab dalam membentuk peristiwa internasional yang paling penting, maka terlihat jelas bahwa realism akan terus menjadi teori HI yang penting". (Jakson Robert:2014) Dalam melakukan suatu kerjasama pasti kita akan melibatkan diri dalam percaturan dunia dengan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan orang atau badan- badan tertentu untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan penting yang berguna bagi kemaslakatan dunia.

Ekonomi harus jadi kekuatan pertahanan Indonesia, perkembangan global yang sudah semakin tidak terbendung dan hegemoni USA mulai digeser oleh kekuatan China dan Rusia telah menciptakan tantangan baru. Maka Indonesia harus menjadikan Kekuatan Ekonominya menjadi salah satu pilar dalam perkuatan pertahanan nasional dlam rangka tetap menjaga Keutuhan dan Kedaukatan NKRI.

Karena kedepan peperangan tidak hanya semata peperangan secara fisik akan tetapi peperangan dibidang ekonomi akan berdampak yang luas terhadap peperangan dengan angkat senjata itu sendiri.

Menurut pendapat pakar Ekonomi Dekan FEUI Prof Firmanzah menjelaskan, Prodi Pertahanan Ekonomi mengkombinasikan aspek keamanan dari sisi ekonomi untuk menyusun langkah strategi mengejar ketinggalan Indonesia dari negara lain. Dicontohkan gejolak politik Nigeria yang turut mengakibatkan harga minyak mentah naik sehingga memukul perekonomian negala lain akibat kenaikan harga bahan bakar. Ekonomi Pertahanan diharapkan dapat menciptakan strategi ekonomi nasional yang ampuh sebagai alat pertahanan dari gejoklak negara lain (Firmanzah, 2010).

2.2. Keamanan Nasional.

Keamanan Nasional secara Tradisonal hanya dipandang sebagai masalah pertahanan dan keamanan saja, sesuai dampak dari perubahan- perubahan yang terjadi, telah meluas cakupannya baik vertikal, horizontal. Fungsi Keamanan Nasional adalah akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Cara yg daiambil untuk memastikan keamanan Nasional termasuk didalamnya (1) Penggunaan Diplomasi untuk mencari Sekutu dan mengisolasi ancaman. (2) Menggunakan kekuatan ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama. (3) Menjaga TNI yang efektif . (4) Memastikan pemulihan cepat dan perbanyak infrastruktur kritikal. (5) Gunakan Jasa Intelegen untuk Deteksi dan mengalahkan atau mencegah ancaman dan espionase dan melindungi informasi rahasia. (6) Menjaga budaya nasional yang

tidak di kenal atau anti nasionalisme terutama diruang hiburan utama (James, 2001).

Konsep lahirnya suatu Kebijakan dapat digambarkan dengan Peraturan tertingi di negara kita yakni Tap MPR dan seterusnya. Acuan dari Kebijakan di Indonesia dapat digambarkan penulis sebagai berikut : (1) UUD 1945, (2) TAP MPR, (3) UU, (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden dll. Pertahanan Negara dikelola dalam sistim pertahanan total untuk mencapai tujuan nasional. Sistim tersebut pada dasarnya merupakan pertahanan yang melibatkan seluruh warga negra sesuai dengan peran dan fungsinya. (Buku Putih:2015).

Kemenkumham, Kemenhan RI, Kemenlu, Kemendagri. -UU No 20 tahun 2008 tentang pokok Pertahanan Negara. UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Merupakan segala usaha untuk menjaga dan mengamankan Kedaulatan NKRI. Bahwa dalam Undang- undang Pertahanan Negara ini menurut penulis melihat bahwa Pertahanan Negara Pancasila sebagai dasar Negara artinya Falsafah dan Pandangan hidup bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Pancasila serta Kedaulatan NKRI.

RUU No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (PSDN). RUU ini diajukan oleh Komisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tanggal ditetapkan 24 Oktober 2019. (Komnas Ham:2019). Kebijakan yang sudah dikonsep untuk dapat segera diundangkan maka harus melalui pembahasan dan persetujuan lembaga terkait, diantaranya lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kita berharap semoga RUU tersebut segera disyahkan dan diberlakukan di Indonesia.

Presiden Republik Indonesia telah megesahkan UU No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang diundangkan

Kemenkuham. Mencabut UU no.27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, serta UU No 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Kemudian, Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasioanal sudah penulis kupas diatas bahwa UUD 1945 pada alinea ke 4 " Dan perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu , berdaulat , adil dan makmur. Menurut pandangan penulis bahwa hal tersebut memuat tanggung jawab yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia, Kemerdekaan dan kedaulatan NKRI harus terus tetap terjaga dan terpelihara dengan sebaik-baiknya. Serta pada Alinea ke 3 bahwa Dalam upaya mencapai cita- cita Kemerdekaan diantaranya, Pembentukan suatu Pemerintahan Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertinban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamain Abadi dan keadilan social. Ini artinya Peran Republik Indonesia dalam Keamanan Nasional dan Peran Internasional.

Demikian halnya di tingkat nasional kebijakan yang akan diambil haruslah melalui mekanisme yang baik dan terkoordinasi. Konsep lahirnya suatu Kebijakan dapat digambarkan dengan Peraturan tertingi di negara kita yakni Tap MPR dan seterusnya. Kebijakan yang sudah dikonsep untuk dapat segera diundangkan maka harus melalui pembahasan dan persetujuan lembaga terkait, diantaranya lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kementerian Lembaga diantaranya Kemenkumham, Kemenhan RI, Kemenlu, Kemendagri dll. Presiden Republik Indonesia telah megesahkan UU No.23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara yang diundangkan Kemenkuham. Mencabut UU no.27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, serta UU No

56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih. Keamanan Nasional secara Tradisonal hanya dipandang sebagai masalah pertahanan dan keamanan saja, sesuai dampak dari perubahan- perubahan yang terjadi, telah meluas cakupannya baik vertical, horizontal.

Fungsi Keamanan Nasional adalah akan memproduksi dan menciptakan rasa aman dalam pengertian luas, yang di dalamnya tercakup rasa nyaman, damai, tentram dan tertib. Cara yg daiambil untuk memastikan keamanan Nasional termasuk didalamnya (1) Penggunaan Diplomasi untuk mencari Sekutu dan mengisolasi ancaman. (2) Menggunakan kekuatanEkonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama. (3) Menjaga TNI yang efektif . (4) Memastikan pemulihan cpat dan perbanyak infrastruktur kritikal. (5) Gunakan Jasa Intelegen untuk Deteksi dan mengalahkan atau mencegah ancaman dan espionase dan melindungi informasi rahasia. (6) Menjaga budayanasional yang tidak di kenal atau antinasionalisme terutama diruang hiburan utama (James, 2001).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, memahami fenomena yang dialami subyek perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya dalam bentuk kata dan bahasa, secara ilmiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Meleong:2012). Guna mencapai keamanan nasional serta tercapainya kedaulatan NKRI, Diplomasi selalu menjadi pilihan penting dalam mencapai tujuan. Dalam pelaksanan pengambilan keputusan atau kebijakan maka Negara boleh mengunakan sumber daya kekuatan ekonomi, militer dan diplomasi sebagai kekuatan bangsa. Dalam konsep studi keamanan nasional dalam presfectif Diplomasi pertahanan maka kebijakan yang dihasilkan adalah kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional guna mencapai keberhasilan keamanan dan kedaulatan negara menjadi hal yang fundamental dan harus mutlak tercapai.

Strauss Anselm menyatakan bahwa, Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang komplek tentang fenomena yang sulit di ungkapkan oleh metode kualitatif" (Anselm, 2009). Pilihan pendekatan dalam metode kulatitaf tergantung pada tujuan peneliti dan kemungkinan ketersediaan data (halkis, 2020).

2.3 Diplomasi Pertahanan militer dan publik.

Diplomasi Pertahanan menurut Halkis (2018) sulit dibedakan antara pratek dan teori, karena Studi Diplomasi Pertahanan merupakan irisan berbagai diplomasi dalam konteks pertahahan negara. Diplomasi pertahanan Indonesia merupakan cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan. Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasikan makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures* (CBMs), *civil-military relation* dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*. Pedrason menjelaskan bahwa dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing.

4. Hasil dan Diskusi

Peneliti mengambil teori Kebijakan Luar Negeri dengan Model Pilihan Rasional Analisis terhadap proses pertimbangan yang dilakukan *decision maker*

dapat dijembatani melalui Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Process*). Teori Pengambilan Keputusan atau seringkali disebut sebagai Teori Kebijakan Luar Negeri, diperkenalkan Graham T. Allison (1969) ketika ia menganalisis Studi Kasus. Graham menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dianalisis melalui tiga model diantaranya (1) Model Pilihan Rasional. (2) Model Proses Organisasional. (3) Model Politik Birokratik. Berdasarkan Model Pilihan Rasional, unit dasar analisis berupa negara (*national actor*). Negara dianggap sebagai aktor yang dapat menentukan tindakan secara rasional karena sebuah pertimbangan dipengaruhi oleh komponen tujuan dan sasaran, opsi, konsekuensi, dan pilihan. Ketika tujuan dan sasaran dapat diidentifikasikan, maka muncul berbagai opsi tindakan yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Untuk memperkuat diplomasi pertahanan perlu perkuatan regulasi disamping perkuat diplomasi umum dan diplomasi militer.

4.1 Perkuatan Regulasi

Pengesahan RUU Keamanan Nasional nasional mendasak untuk memenuhi kebutuhan Diplomasi pertahanan. Pasal-pasal yang harus melengkapi diantarnya (1) Hkm dan PUU, (2) Hukum Perdata, (3) Hukum Pidana, (4) Hukum Bisnis, (5) Hukum Lingkungan, (6) Hukum Administrasi Negara, (7) Hukum Internasional, (8) Hukum Tekhnologi. Dan Standart Pelayanannya diantaranya adalah (1) Proses Harmonisasi, (2) Proses Penyiapan RUU, (3) Proses Perundangan, (4) Proses Perancangan, (5) Proses Ligimitasi. Rancanga Peraturan yang ada diantaranya adalah (1) Prolegnas 2010- 2014, (2) Prolegnas 2015 – 2019. Dengan perkutan hokum ini diharapakan diplomasi pertahanan memiliki kekuatan siplomasi dalam meyakinkan para pihak bahwa Indoensia memiliki jaminan keamanan secara konstitutif.

Sebagai perbandingan dalam menunjang kegiatan diplomasi pertahanan diantaranya adalah : (1) Prajurit Marinir TNI AL dan USMC gelar latihan bersama dlm Platoon Exhsnge(Platex)2019, (2) Kunjungan Kehormatan Commander Marine Force Pacific USA di MAKO KORMAR Jakarta 2019, (3) Latma Carat 2019 Marinir dan USMC, (4) SEA Garuda 20AB 2019 di Thailand,

(5) TNI AD Latgab dgn gren Baret USA pd Garuda Shield 2019, (6) 17 negara Asing Latgab dgn TNI di Kepulauan Riau 2014, (7) TNI AU latgab dgn Singapura 2018, (8) Latihan Bersama/ Latgab TNI, (9) Pembebasan Sandera di Somalia, (10) Pembebasan Sandera Abusayaf Filiphina, (11) TNI AD Latgab dgn gren Baret USA pd Garuda Shield 2019, (12) 17 negara Asing Latgab dgn TNI di Kepulauan Riau 2014, (13) TNI AU latgab dgn Singapura 2018, (14) Prolagnas, (14) Pasukan Garuda I(UNOC)1960, Garuda I Vietnam 1973-1975, Garuda Bosnia 1994-1996, Milobs, Milstaf Afrika, FHQSU Lebanon 2008, Yonmex Lebanon, MONUC Congo, Monusco, Unamid, Monusca Car, Minustah Haiti, Yon Komposit Congo Afrika., (15) Meeting Diplomasi Pertahanan

Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah , melindungi kehormatan dan keselamatan banga serta menegakkan hukum di perairan Indonesia. Meningkatkan Ketahanan Nasional Bidang Maritim adalah Menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (1) Melaksanakan Tugas TNI Matra Laut bidang pertahanan, (2) Menegakkan hukum dan menjaga KAM yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. (3) Melaksanakan tugas diplomasi TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oelh pemerintah. (4) Melaksanakan

tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan tri matra Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.

4.2 Peningkatan Diplomasi Militer dan Publik.

Diplomasi Pertahanan menurut Halkis (2018) sulit dibeda antara pratek dan teori, karena Studi Diplomasi Pertahanan merupakan irisan berbagai diplomasi dalam konteks pertahahan negara. Diplomasi pertahanan Indonesia merupakan cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan. Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasikan makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures* (CBMs), *civil-military relation* dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*. Pedrason (2015) menjelaskan bahwa dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing. Pencapaian kesepahaman (kepercayaan) dapat dilihat dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs terutama dalam rangka menciptakan perdamaian, meskipun seringkali konsep CBMs lebih banyak dibahas pada masa konflik. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs di bidang militer telah dikemukakan Baviera di dalam Tabel 1. Dengan mengidentifikasikan aktvitas komunikasi, transparansi, konsultasi, itikad baik, dan batasan diantara pihak-pihak yang terlibat.

No	Global	Kamnas	Diplomasi Pertahanan
1.	Regional	*Visit; Cross-Training; Code of Conduct*	*Hotlines; Regular Bilateral Dialogue*
		Carat, joint exercise us marine and Marinir in Situbondo	*ARF; ASEAN Senior Officials Meeting*
		Joint exercise Malindo	
		Non-Agression Agreement; Troop Reduction Agreement	*Code of Conduct; Disarmament and Demilitarization Agreements*
			Dubes bangun komunikasi dengan Negara lain.
			Asean Defence Meeting
			JIDD (Jakarta International defence Dialog)
		Regional Defence Security forum	*Regional Defence Diplomacyforum*
			Dubes, Athan RI
		Prajurit Marinir TNI AL dan USMC gelar latihan bersama dlm Platoon Exhsnge(Platex)2019	Pasukan Garuda I(UNOC)1960, Garuda I Vietnam 1973-1975, Garuda Bosnia 1994-1996, Milobs, Milstaf Afrika, FHQSU Lebanon 2008, Yonmex Lebanon, MONUC Congo, Monusco, Unamid, Monusca Car, Minustah Haiti, Yon Komposit Congo Afrika.
		Kunjungan Kehormatan Commander Marine Force Pacific USA di MAKO KORMAR Jakarta 2019	
		Latma Carat 2019 Marinir dan USMC	
		SEA Garuda 20AB 2019 di Thailand	
		TNI AD Latgab dgn gren Baret USA pd Garuda Shield 2019	

		17 negara Asing Latgab dgn TNI di Kepulauan Riau 2014	
		TNI AU latgab dgn Singapura 2018	
2.	Nasional	Prolagnas	Meeting Diplomasi Pertahanan
		Latihan Bersama/ Latgab TNI	Keterlibatan TNI dlm OMSP
		Pembebasan Sandera di Somalia	Satgas Ambalat XXIV Marinir 2019 Kibarkan Bendera Merah Putih di Bawah Laut
		Pembebasan Sandera Abusayaf Filiphina	

Gambar.1 Tabel Tipology CBMs

1. Hasil dan Diskusi

Peneliti mengambil teori Kebijakan Luar Negeri dengan Model Pilihan Rasional Analisis terhadap proses pertimbangan yang dilakukan *decision maker* dapat dijembatani melalui Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Process*). Teori Pengambilan Keputusan atau seringkali disebut sebagai Teori Kebijakan Luar Negeri, diperkenalkan Graham T. Allison (1969) ketika ia menganalisis Studi Kasus. Graham menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dapat dianalisis melalui tiga model diantaranya (1) Model Pilihan Rasional. (2) Model Proses Organisasional. (3) Model Politik Birokratik. Berdasarkan Model Pilihan Rasional, unit dasar analisis berupa negara (*national actor*). Negara dianggap sebagai aktor yang dapat menentukan tindakan secara rasional karena sebuah pertimbangan dipengaruhi oleh komponen tujuan dan sasaran, opsi, konsekuensi, dan pilihan. Ketika tujuan dan sasaran dapat diidentifikasikan, maka muncul berbagai opsi tindakan yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Untuk memperkuat diplomasi pertahanan perlu perkuatan regulasi disamping perkuat diplomasi umum dan diplomasi militer.

4.1 Perkuatan Regulasi

Pengesahan RUU Keamanan Nasional nasional mendasak untuk memenuhi kebutuhan Diplomasi pertahanan. Pasal-pasal yang harus melengkapi diantarnya (1) Hkm dan PUU, (2) Hukum Perdata, (3) Hukum Pidana, (4) Hukum Bisnis, (5) Hukum Lingkungan, (6) Hukum Administrasi Negara, (7) Hukum Internasional, (8) Hukum Tekhnologi. Dan Standart Pelayanannya diantaranya adalah (1) Proses Harmonisasi, (2) Proses Penyiapan RUU, (3) Proses Perundangan, (4) Proses Perancangan, (5) Proses Ligimitasi. Rancanga Peraturan yang ada diantaranya adalah (1) Prolegnas 2010- 2014, (2) Prolegnas 2015 – 2019. Dengan perkutan hokum ini diharapakan diplomasi pertahanan memiliki kekuatan siplomasi dalam meyakinkan para pihak bahwa Indoensia memiliki jaminan keamanan secara konstitutif.

Sebagai perbanding dalam menunjang kegiatan diplomasi pertahanan diantaranya adalah : (1) Prajurit Marinir TNI AL dan USMC gelar latihan bersama dlm Platoon Exhsnge(Platex)2019, (2) Kunjungan Kehormatan Commander Marine Force Pacific USA di MAKO KORMAR Jakarta 2019, (3) Latma Carat 2019 Marinir dan USMC, (4) SEA Garuda 20AB 2019 di Thailand, (5) TNI AD Latgab dgn gren Baret USA pd Garuda Shield 2019, (6) 17 negara Asing Latgab dgn TNI di Kepulauan Riau 2014, (7) TNI AU latgab dgn Singapura 2018, (8) Latihan Bersama/ Latgab TNI, (9) Pembebasan Sandera di Somalia, (10) Pembebasan Sandera Abusayaf Filiphina, (11) TNI AD Latgab dgn gren Baret USA pd Garuda Shield 2019, (12) 17 negara Asing Latgab dgn TNI di Kepulauan Riau 2014, (13) TNI AU latgab dgn Singapura 2018, (14) Prolagnas, (14) Pasukan Garuda I(UNOC)1960, Garuda I Vietnam 1973-1975, Garuda Bosnia 1994-1996, Milobs, Milstaf Afrika, FHQSU Lebanon 2008, Yonmex Lebanon, MONUC Congo,

Monusco, Unamid, Monusca Car, Minustah Haiti, Yon Komposit Congo Afrika., (15) Meeting Diplomasi Pertahanan

Untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah , melindungi kehormatan dan keselamatan banga serta menegakkan hukum di perairan Indonesia. Meningkatkan Ketahanan Nasional Bidang Maritim adalah Menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (1) Melaksanakan Tugas TNI Matra Laut bidang pertahanan, (2) Menegakkan hukum dan menjaga KAM yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi. (3) Melaksanakan tugas diplomasi TNI dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oelh pemerintah. (4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan tri matra Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.

4.2 Peningkatan Diplomasi Militer dan Publik.

Diplomasi Pertahanan menurut Halkis (2018) sulit dibeda antara pratek dan teori, karena Studi Diplomasi Pertahanan merupakan irisan berbagai diplomasi dalam konteks pertahahan negara. Diplomasi pertahanan Indonesia merupakan cara dan strategi melalui berbagai aspek kerjasama seperti ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan diplomasi sehingga negara-negara dapat memiliki hubungan pertemanan, lebih jauh dapat saling bekerja sama, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan. Terdapat tiga karakteristik tujuan yang dapat mengidentifikasikan makna dari diplomasi pertahanan, yakni *confidence building measures* (CBMs), *civil-military relation* dan *wider foreign policy objectives in the other countries' area of defense*. Pedrason

(2015) menjelaskan bahwa dalam rangka mencegah potensi konflik, yang dapat dilakukan adalah dengan saling memberikan pemahaman atas persepsi masing-masing. Pencapaian kesepahaman (kepercayaan) dapat dilihat dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs terutama dalam rangka menciptakan perdamaian, meskipun seringkali konsep CBMs lebih banyak dibahas pada masa konflik. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan CBMs di bidang militer telah dikemukakan Baviera di dalam Tabel 1. Dengan mengidentifikasikan aktvitas komunikasi, transparansi, konsultasi, itikad baik, dan batasan diantara pihak-pihak yang terlibat.

Diplomasi Pertahanan dilihat bagian dari cara atau hubungan baik menjalin kemitraan dibidang ekonomi, social budaya dan pertahanan atau militer. Diplomasi Pertahanan suatu negara dapat dijadikan alat mencapai keberhasilan atau target kebijakan luar negerinya. Gregory Winger berpendapat bahwa diplomasi pertahanan merupakan suatu cara penggunaan militer bukan untuk kekerasan, seperti pertukaran perwira, kunjungan kapal perang, latihan militer bersama dalam rangka mencapai kepentingan internasional suatu negara. Diplomasi Pertahanan adalah penggunaan militer dalam masa damai sebagai alat untuk kebijakan keamanan dan hubungan luar negeri. Hal ini diperkuat Martin yang mendefinisikan diplomasi pertahanan sebagai penggunaan militer untuk OMSP dengan memanfaatkan pengalaman latihan dan disiplinnya untuk mencapai kepentingan nasional baik di dalam maupun di luar negeri (Winger,2014)

Dengan demikian negosiasi atau cara yang dilakukan dengan hubungan baik yang mengahasilkan kesepakatan saling menguntungkan kedua belah pihak. Negosiasi itu dapat dilakukan oleh orang sipil/ Diplomat sipil atau Diplomat publik dan militer. Untuk itu agen diplomasi dapat digambarkan:

Gambar.2 Kedudukan Agen Diplomasi Pertahanan

Dalam melakukan suatu kerjasama pasti kita akan melibatkan diri dalam percaturan dunia dengan melakukan pembahasan dan pertemuan dengan orang atau badan- badan tertentu untuk menghasilkan keputusan atau kebijakan penting yang berguna bagi kemaslakatan dunia. Demikian halnya di tingkat nasional kebijakan yang akan diambil haruslah melalui mekanisme yang baik dan terkoordinasi.

5. Kesimpulan.

Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia sangat penting. Tetapi diplomasi yang di lakukakan TNI saat ini masih belum maksimal perlu ditingkatkan ke depannya untuk memperkuat diplomasi pertahanan disampin diplomasi umum baik terkait dengan ekonomi, politik maupun kebudayaan. Keamanan nasional Indonesia sudah baik tetapi belum maksimal karena masih ada ancaman dalam negeri dan luar negeri yang harus di selesaikan dengan sebaik- baiknya. Maka

perlunya Kebijakan Keamanan Nasional yang menyeluruh dari komponen TNI dan Rakyat sebagai unsur cadangan. Kemanunggalan TNI dan rakyat dalam Menjaga Kedaulatan Negara Indonesia sebab NKRI adalah harga mati. RUU Keamanan Nasional sedang dalam proses yakni RUU No.23 tahun 2019 tentang PSDN yang diundangkan oleh Komnas HAM.

Daftar Pustaka

Aco, A. A. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. *Integrasi PIPS Pascasarjana UNM*.

Bisri, M. (n.d.). *No Title pedoman menulis proposal penelitian* (2009th ed.).

Burns, A., & Eltham, B. (2014). Australia's Strategic Culture: Constraints and Opportunities in Security Policymaking. *Contemporary Security Policy*. https://doi.org/10.1080/13523260.2014.927672

CNBC Indonesia. (2019). Ekonomi RI Cukup Berat, Bahkan Berat Sekali! *Purnomo, Anthony Kevin & Herdaru*.

Cornish, P., & Dorman, A. (2009). National defence in the age of austerity. *International Affairs*. https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2009.00825.x

Darmawan, W., Alkadrie, J., & Sudirman, A. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Enginering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*. https://doi.org/10.24198/padjir.v1i4.26242

Floridi, L. (2008). A defence of informational structural realism. *Synthese*. https://doi.org/10.1007/s11229-007-9163-z

Göllner, J., Mak, K., & Woitsch, R. (2010). Intellectual capital management using knowledge scorecards: The Austrian National Defence Academy showcase. *Lecture*

Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). https://doi.org/10.1007/978-3-642-15172-9_23

Gunawan, M. V. (2020). PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA TAHUN 2009-2019 [THE UNITED STATES' ROLE IN BOLSTERING THE INDONESIAN MARITIME STRUCTURE FROM 2009-2019]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*. https://doi.org/10.19166/verity.v11i21.2449

Halkis, Mhd, 2020, Filsafat Ilmu Pertahanan Sebuah pengantar, Unhan Press, Bogor

---------- (editor), 2018, Filsafat dan Teori-teori Diplomasi Pertahanan, Kapita Selekta Seri I: Ideologi dan Praktek, Unhan Press, 2018

Hall, Dinel M.(2016), *Applications Of Text Analytics In The Intelligence Community,* Naval Postgraduate School Monterey, CA 93943-5000

J. M. (n.d.). *Template Artikel Jurnal*. https://www.setneg.go.id/index.php?option

Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia. (2016). In *Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia* (Vol. 15, Issue 1, pp. 1–42). https://doi.org/10.22146/jkn.22307

Leonardo, M. (2001). The Three Phases of Italian Parties. In *Political Parties and Democracy*.

Lewis, J. A. (2014). National Perceptions of Cyber Threats. *Strategic Analysis*. https://doi.org/10.1080/09700161.2014.918445

Manda, D. (2015). Urgensi Ketahanan Nasional Sebagai Geostrategi Indonesia. *Integrasi PIPS Pascasarjana UNM*.

MINDEF. (2010). Malaysia's National Defence Policy. In *Government of Malaysia*.

Moravcsik, A. (2002). In defence of the "democratic deficit": Reassessing legitimacy in the European Union. In *Journal of Common Market Studies*. https://doi.org/10.1111/1468-5965.00390

National Audit Office. (2014). Major Projects Report 2013. *National Audit Office*. https://doi.org/HC 684-1

Prasetyo, revoltierende13 & A. B. (2019). Gebrakan Anak Muda dalam Bidang Politik. *Ppi-Jerman.De*.

Purbadian, Y. (2016). *Trik Cepat Membangun Aplikasi Berbasis Web dengan Framework CodeIgniter*. 1–15.

Qomara, G. (2015). Kebangkitan Tiongkok dan Relevansinya terhadap Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun VIII*.

Rosa, R. (2019). Iuu Fishing Kapal Vietnam. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Sindonews. (2020). *Konflik Natuna, Ini Kekuatan Militer Indonesia Vs China*. Https://Sumut.Sindonews.Com/Berita/9127/1/Konflik-Natuna-Ini-Kekuatan-Militer-Indonesia-vs-China.

Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?* Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D.W., S. (2018). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM MENCAPAI KEPENTINGAN NASIONAL. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i3.441

Sudarsono, B. P., Mahroza, J., & D, W. S. (2018). Dipomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mencapai Kepentingan Nasional (Indonesia's Defense Diplomacy in Achieving The National Interest). *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*.

Widisuseno, I., Ilmu, F., & Universitas, B. (2013). Ketahanan Nasional Dalam Pendekatan Multikulturalisme. *Ketahanan Nasional Dalam Pendekatan Multikulturalisme*, *18*(2). https://doi.org/10.14710/humanika.18.2